

DISPARITAS REGIONAL KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA

Faty Rahmarisa dan Bambang Kurniawan
Universitas Islam Sumatera Utara
Email: fatyrahmarisa@gmail.com

ABSTRACT

Economic development basically aims to improve people's welfare. Economic development cannot be separated from economic growth due to economic development and also in economic growth can facilitate a process of economic development. However, with the high growth of a country's economy does not mean all its regions have the same growth rate due to the limitation and differences in terms of the potential of natural resources, human resources and the other factors that impact on the emergence of disparity. Disparity is a problem that until now cannot be eliminated. Pematang Siantar city has a low level of disparity in comparison with other cities located in North Sumatera. This study aims to estimate how big the regional disparity in the Pematang Siantar and to determine the effect of per capita GDP on disparities in the Pematang Siantar within the period of 2011-2015. This research uses GDP data and also population in North Sumatera in 2011-2015 obtained from Central Bureau of Statistics of North Sumatera. The method of analysis used in this study is the Williamson Index using PDRB per capita as the baseline data. Based on the results of the study, PDRB per capita Pematang Siantar has a negative effect against disparity in Pematang Siantar in terms of percentage increase per capita GRDP per capita. Pematang Siantar with an average disparity during the year 2011-2015 amounted to 0.030 with low disparity criteria during the study period 2011-2015.

Keywords: *Williamson Index, regional disparity, GRDP per-capita*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang dianggap penting untuk dilaksanakan. Pembangunan juga merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan dalam meningkatkan pendapatan perkapita. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah dan berbagai elemen dalam suatu negara untuk berpartisipasi secara aktif dan berkontribusi dalam sebuah proses pembangunan.

Tujuan pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan secara umum dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya, karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan (Lili Masli, 2008).

Pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui penanaman modal, manajemen, pengembangan teknologi dan pengetahuan, keterampilan dan penambahan kemampuan berorganisasi. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan ekonomi mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dan juga dalam pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar suatu proses pembangunan ekonomi.

Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara bukan berarti semua wilayahnya memiliki tingkat pertumbuhan yang sama karena adanya keterbatasan dan perbedaan baik disisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lembaga institusi pendukungnya. Akibat dari perbedaan ini kemampuan dari suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi tidak sama. Inilah yang menyebabkan adanya disparitas antar daerah dan mengakibatkan adanya daerah maju (*Development Region*) dan

daerah terbelakang (*Underdevelopment Region*). Terjadinya disparitas antar daerah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah. Aspek disparitas ini juga mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Masalah yang timbul menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan pertumbuhan tidak muncul diberbagai daerah pada waktu yang bersamaan, pertumbuhan hanya terjadi di beberapa daerah yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensi pertumbuhan yang berbeda, oleh karena itu pelaksanaan pembangunan tidak jarang menciptakan adanya disparitas. Ukuran disparitas dapat dianalisis dengan perhitungan Indeks Williamson. Dasar perhitungannya dengan menggunakan PDRB perkapita yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Dalam pengertiannya, apabila angka Indeks Williamson semakin mendekati nol, maka disparitas semakin kecil dan bila angka Indeks Williamson mendekati satu, maka disparitas yang terjadi semakin besar.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab disparitas yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, keahlian, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan politik, kelembagaan dan juga sistem yang berkembang dan berlaku. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang memberikan definisi bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah sekarang ini dan masa yang akan datang sangat ditentukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Sjafrizal (2008) mengemukakan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah setempat. Berjalannya otonomi daerah diharapkan masyarakat dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi wilayahnya untuk penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pematang Siantar adalah kota di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu kota yang ikut serta dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi tersebut, sehingga Kota Pematang Siantar memiliki kemandirian dalam melaksanakan pemerintahan dan menentukan kemajuan pembangunan serta diberi kewenangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya secara leluasa untuk dialokasikan pada sektor-sektor ekonomi yang ada.

Kota Pematang Siantar dipilih sebagai objek penelitian disparitas regional dengan asumsi (hipotesis) bahwa diduga terdapat hubungan negatif antara PDRB perkapita dengan disparitas regional. Perbedaan pembangunan akan menyebabkan disparitas regional semakin besar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merata di setiap daerah akan menyebabkan disparitas yang juga tidak merata. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat disparitas yang terjadi, dan untuk memperoleh ketentuan pengaruh per-kapita GDP terhadap disparitas di Pematang Siantar pada rentang waktu 2011-2015.

2. METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah data dari BPS Provinsi Sumatera Utara. Sebagai studi kasus, maka yang disoroti adalah tentang PDRB dan pertumbuhan penduduk dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah data tentang PDRB dan pertumbuhan penduduk dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dimana data yang tersedia berdasarkan pencatatan setiap tahun di instansi terkait.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yaitu mencari informasi dari buku-buku yang relevan dan sumber lain yang membahas terkait dengan penelitian ini. Selain itu data juga diperoleh melalui studi dokument di BPS Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, untuk mengukur disparitas regional digunakan metode indeks Williamson, yaitu metode temuan Jeffrey G. Williamson tahun 1965. Dalam hal ini untuk mengukur disparitas regional di Kota Pematang Siantar dengan mempertimbangkan ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah menggunakan PDRB perkapita sebagai data dasar.

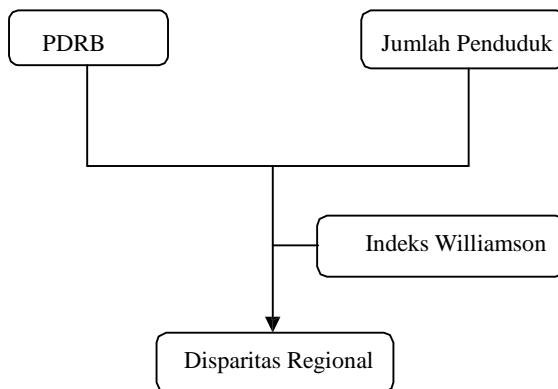
Formulasi indeks Williamson ini secara statistik dapat ditampilkan sebagai berikut:

$$VW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y}$$

- VW = Indeks Williamson
 y_i = PDRB perkapita di Kota i
 y = PDRB perkapita rata-rata kabupaten/kota
 f_i = Jumlah penduduk Kota i
 n = Jumlah penduduk di provinsi

Hal ini berarti bahwa pada dasarnya indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (*coefficient of variation*) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk daerah yang dianalisis. Secara konseptual kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1
Kerangka Kosepsual



Selanjutnya, terdapat tiga kriteria dalam perhitungan Indeks Williamson, yaitu jika Indeks Williamson menunjukkan:

- Angka 0,0 sampai 0,2 maka ketidakmerataannya rendah.
- Angka 0,21 sampai 0,35 maka ketidakmerataannya sedang.
- Angka >0,35 maka ketidakmerataannya tinggi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kota P. Siantar

Kota Pematang Siantar adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, dan kota terbesar kedua di Provinsi tersebut setelah Medan. Karena letak Pematang Siantar yang

strategis merupakan kawasan Jalan Raya Lintas Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 km² dan berpenduduk sebanyak 247.411 jiwa di tahun 2015. Kota Pematang Siantar yang hanya berjarak 128 km dari Medan dan 50 km dari Parapat sering menjadi kota perlintasan bagi wisatawan yang hendak ke Danau Toba. Sebagai kota penunjang pariwisata di daerah sekitarnya, kota ini memiliki 8 hotel berbintang, 10 hotel melati dan 268 restoran. Karena ketertiban pengaturan lalu lintasnya, kota ini pun meraih penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha pada tahun 1996.

Kota Pematang Siantar terletak pada garis 2° 53' 20"- 3° 01' 00" Lintang Utara dan 99° 1'00"- 99° 6' 35" Bujur Timur, berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Luas daratan Kota Pematang Siantar adalah 79,971 Km² terletak 400-500 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan luas wilayah menurut kecamatan, kecamatan yang terluas adalah kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas wilayah 22,723 km² atau sama dengan 28,41% dari total luas wilayah Kota Pematang Siantar.

Berkenaan dengan konsep pembangunan, pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, tak terkecuali di Kota Pematang Siantar, memiliki dasar pijakan tersendiri. Pembangunan adalah proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang dan jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian dalam masa satu tahun.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- Sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.
- Non ekonomi yang mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, IPTEK,

keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.

Pembangunan ekonomi yang berlangsung di suatu negara baik yang membawa dampak positif maupun negatif.

a. Dampak positif pembangunan ekonomi:

- 1) Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
- 2) Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka hal ini akan mengurangi pengangguran.
- 3) Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional.
- 4) Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan semakin beragam dan dinamis.
- 5) Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat dan akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Dampak negatif pembangunan ekonomi; hal itu terjadi jika adanya pembangunan yang tidak terencana dengan baik yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup, atau melakukan proses industrialisasi sehingga berkurangnya lahan pertanian.

Demikian gambaran Kota Pematangsiantar dengan prinsip perkembangannya tidak terlepas dari konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara umum.

3.2 Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala. Data/indikator statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Selanjutnya berkenaan dengan data statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hal ini juga sangat vital untuk melihat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

Menurut Todaro (2004), laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan. Di dalam bukunya, Todaro mengemukakan karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, dan sebagainya. Karakter pertumbuhan ekonomi ini yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin atau tidak. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk.

Ketika pendapatan perkapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang. Ada teori yang mengatakan bahwa ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun kenyataannya ketidakmerataan di Negara Sedang Berkembang (NSB) berkaitan dengan pertumbuhan rendah, sehingga ada *trade off* antara pertumbuhan dan ketidakmerataan (Mudrajad Kuncoro, 2006).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, maka peneliti akan mendeskripsikan data tersebut agar memberikan gambaran nyata

tentang penelitian ini. Pada tabel dibawah ini antar kota di Provinsi Sumatera Utara dan Kota menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto Pematang Siantar selama periode 2011-2015.

Tabel 1
PDRB antar Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Milyar Rupiah)

No	Kota	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sibolga	2.324,88	2.458,50	2.605,01	2.758,57	2.914,51
2	Tanjungbalai	3.689,90	3.919,55	4.152,39	4.392,58	4.637,50
3	Pematang Siantar	6.333,31	6.753,56	7.141,86	7.594,53	7.992,32
4	Tebing Tinggi	2.608,86	2.758,87	2.924,75	3.084,05	3.234,05
5	Medan	97.675,58	105.162,00	110.795,42	117.528,08	124.277,48
6	Binjai	5.236,27	5.553,63	5.890,97	6.234,29	6.571,20
7	Padangsidempuan	2.788,16	2.952,72	3.124,02	3.285,46	3.451,08
8	Gunungsitoli	2.143,60	2.276,15	2.417,72	2.565,26	2.703,50
Tota		122.800,56	131.834,98	139.052,14	147.442,82	155.781,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tabel 1 data menunjukkan bahwa keadaan PDRB antar kota di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 total PDRB antar kota di Provinsi Sumatera Utara sebesar 122.800,56 milyar dan meningkat di tahun 2012 dengan total 131.834,98 milyar. Tahun 2013 total PDRB antar kota di Provinsi Sumatera Utara juga mengalami kenaikan menjadi 139.052,14 milyar dan diikuti dengan peningkatan di tahun 2014 dan 2015 sebesar 147.442,82 milyar dan 155.781,64 milyar.

Pada dasarnya penduduk merupakan modal dasar pembangunan, oleh karena itu data statistik

kependudukan mutlak diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dengan segala aspeknya.

Jumlah penduduk antar kota di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2011 total penduduk antar kota di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 3.311.043 jiwa hingga tahun 2015 mencapai 3.478.859 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk tidak hanya dikarenakan tingginya tingkat kelahiran, melainkan juga dikarenakan faktor perpindahan penduduk yang terjadi. Untuk lebih lengkapnya data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk antar Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015 (jiwa)

No.	Kot	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sibolga	85.271	85.852	85.981	86.166	86.519
2	Tanjungbalai	155.889	157.175	158.599	164.675	167.012
3	Pematang Siantar	236.893	236.947	237.434	245.104	247.411
4	Tebing Tinggi	146.606	147.771	149.065	154.804	156.815
5	Medan	2.117.224	2.122.804	2.123.210	2.191.140	2.210.624
6	Binjai	248.456	250.252	252.263	261.490	264.687
7	Padangsidempuan	193.322	198.809	204.615	206.496	209.796
8	Gunungsitoli	127.382	128.337	129.403	134.196	135.995
Total		3.311.043	3.327.947	3.340.570	3.444.071	3.478.859

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per-kapita antar kota di Provinsi Sumatera Utara juga selalu mengalami peningkatan pada tahun penelitian. Peningkatan jumlah

PDRB perkapita wilayah menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian dan pembangunan wilayah itu sendiri sebagaimana terlihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
PDRB Perkapita antar Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2015
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Ribu Rupiah)

No.	Kot	2011	2012	2013	201	201
1	Sibolga	27.264,60	28.636,49	30.297,51	32.014,60	33.686,36
2	Tanjungbalai	23.670,05	24.937,49	26.181,69	26.674,24	27.767,47
3	Pematang Siantar	26.734,90	28.502,41	30.079,35	30.984,93	32.303,82
4	Tebing Tinggi	17.795,04	18.669,90	19.620,64	19.922,29	20.623,35
5	Me d a n	46.133,80	49.539,19	52.182,98	53.637,87	56.218,28
6	Binjai	21.075,24	22.192,15	23.352,49	23.841,41	24.826,30
7	Padangsidempuan	14.422,36	14.852,04	15.267,80	15.910,53	16.449,69
8	Gunungsitoli	16.828,12	17.735,73	18.683,65	19.115,77	19.879,41
	Rata-rata	24.240,51	25.633,18	26.958,26	27.762,70	28.969,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

3.3 Tingkat Disparitas Regional di Kota Pematangsiantar

Keseimbangan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui penggunaan teori “disparitas regional”. Disparitas adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan. Disparitas regional merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Disparitas ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Development Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdevelopment Region*). Terjadinya disparitas ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Kesempatan dan peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik. Sedangkan daerah-daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan prasarana dan sarana serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial-budaya sehingga akibatnya disparitas regional cenderung lebih cepat di

daerah dengan kondisi yang lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan.

Keadaan yang berbeda terjadi di negara yang sudah maju dimana kondisi daerah yang umumnya telah dalam kondisi yang lebih baik dari segi prasarana dan sarana serta kualitas sumberdaya manusia. Disamping itu, hambatan-hambatan sosial dan budaya dalam proses pembangunan hampir tidak ada sama sekali. Dalam kondisi demikian, setiap kesempatan peluang pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih merata antar daerah. Akibatnya, proses pembangunan pada negara maju akan cenderung mengurangi disparitas regional.

Disparitas juga terjadi antara daerah yang cepat tumbuh dengan daerah yang tertinggal. Disparitas regional terlihat dari adanya pendapatan perkapita penduduknya. Dalam kaitan ini Sjafrizal (2012), menjelaskan bahwa untuk dapat mengetahui daerah yang cepat tumbuh dan daerah yang tertinggal dapat digunakan matrik Tipologi Klassen dengan menggunakan dua indikator yaitu laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita. Kemudian dari sini menghasilkan pengelompokan daerah menurut struktur pertumbuhan ekonomi dan tingkat pembangunan.

Melihat disparitas regional dalam suatu negara atau suatu daerah bukanlah hal yang mudah karena hal ini dapat menimbulkan debat yang berkepanjangan. Adakalanya masyarakat berpendapat bahwa disparitas suatu daerah cukup tinggi setelah melihat banyak kelompok miskin pada daerah bersangkutan. Akan tetapi ada pula masyarakat merasakan adanya disparitas yang cukup tinggi setelah melihat adanya segelintir kelompok kaya di tengah-tengah masyarakat yang umumnya masih miskin. Perlu diingat disini bahwa, berbeda

dengan distribusi pendapatan yang melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat, disparitas regional melihat perbedaan antar wilayah. Hal yang dipersoalkan disini bukan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, tetapi adalah perbedaan antar daerah maju dan daerah terbelakang.

Ukuran disparitas regional yang mula-mula ditemukan adalah Indeks Williamson yang digunakan dalam studinya pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, index ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah Indeks Williamson muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang mula-mula menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar konstan. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok.

Dari hasil perhitungan terhadap disparitas regional di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan alat analisis Indeks Williamson (V_w) dengan tiga (3) kriteria perhitungan indeks Williamson yaitu angka 0.0 sampai 0.2 maka ketimpangannya rendah, angka 0.21 sampai 0.35 maka ketimpangannya sedang, dan angka > 0.35 maka ketimpangannya tinggi. Dapat dilihat pada table 1, pada tahun 2011-2015 nilai rata-rata disparitas regional pada Kota Pematang Siantar sebesar 0,030 yang menunjukkan bahwa disparitas di Kota Pematang Siantar masuk ke dalam kriteria rendah.

Tabel 4
Nilai Indeks Williamson untuk
Disparitas di Kota Pematang Siantar
Tahun 2011-2015

Tahun	Nilai
2011	0,0275
2012	0,0299
2013	0,0309
2014	0,0310
2015	0,0307

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut

Pada tabel 4 di atas, hasil dari perhitungan nilai Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Utara dengan studi kasus Kota Pematang Siantar dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2011 nilai Indeks Williamson di Kota Pematang Siantar sebesar 0,0275, disparitas yang terjadi di Kota Pematang Siantar termasuk dalam salah satu kriteria Indeks Williamson yaitu angka $>0,2$ yang menunjukkan bahwa tingkat disparitas yang terjadi di Kota Pematang Siantar adalah rendah. Tahun 2012, disparitas di Kota Pematang Siantar mengalami kenaikan menjadi 0,0299 tetapi masih dalam kriteria disparitas rendah. Diikuti kenaikan di tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 0,0309 dan 0,0310 dengan kriteria rendah. Namun pada tahun 2015 nilai Indeks Williamson untuk Kota Pematang Siantar mengalami penurunan menjadi sebesar 0,0307 dengan kriteria rendah. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas di Kota Pematang Siantar selama periode tahun 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan.

3.4 Pengaruh PDRB Perkapita

Menurut Sjafrizal (2012), beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas regional adalah sebagai berikut:

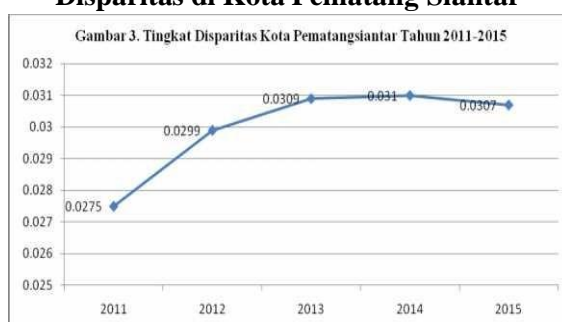
1. Perbedaan kandungan sumber daya alam. Penyebab utama yang mendorong timbulnya disparitas regional adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan kandungan sumberdaya alam ini di Indonesia ternyata cukup besar.
2. Perbedaan kondisi demografis. Faktor utama lainnya yang juga dapat mendorong terjadinya disparitas regional adalah bilamana terdapat perbedaan kondisi demografis yang cukup besar antar daerah. Kondisi demografis yang dimaksudkan disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan disparitas regional. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah, transmigrasi, atau migrasi spontan. Alasannya adalah

karena bila mobilitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah
Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan disparitas regional. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya bilamana, konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadi pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat.
5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah
Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi bilaman investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah ternyata lebih rendah.

Sementara pengaruh PDRB perkapita terhadap disparitas di kota Pematang Siantar dapat dilihat sebagaimana tertera pada gambar 1 berikut.

Gambar 1
Pengaruh PDRB Perkapita Terhadap Disparitas di Kota Pematang Siantar



Gambar 2
Presentasi Kenaikan PDRB Perkapita



Pada gambar 2 menunjukkan bahwa persentase kenaikan PDRB perkapita Kota Pematang Siantar cenderung mengalami penurunan dan gambar 3 menunjukkan bahwa disparitas di Kota Pematang Siantar cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2011-2015. Pada tahun 2012 persentase kenaikan PDRB perkapita Kota Pematang Siantar sebesar 6,61 dan disparitas Kota Pematang Siantar mengalami kenaikan sebesar 0,0299. Diikuti tahun 2013 dan tahun 2014 persentase kenaikan PDRB Kota Pematang Siantar mengalami penurunan menjadi 5,53 dan 3,01 sedangkan disparitas Kota Pematang Siantar mengalami kenaikan menjadi 0,0309 dan 0,031. Namun di tahun 2015 persentase kenaikan PDRB Kota Pematang Siantar mengalami kenaikan menjadi 5,53 dan 3,01 sedangkan disparitas Kota Pematang Siantar mengalami penurunan menjadi 0,0309 dan 0,031.

Berdasarkan gambar 2 dan gambar 3 dapat diketahui bahwa PDRB perkapita berpengaruh negatif terhadap disparitas di kota Pematang Siantar yang dapat ditinjau dari persentase kenaikan PDRB di kota Pematang-siantar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang penerapan Indeks Williamson untuk menghitung disparitas regional di Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Kota Pematang Siantar), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis Indeks Williamson menunjukkan bahwa Kota Pematang Siantar memiliki nilai rata-rata dengan kriteria rendah pada periode tahun 2011-2015 sebesar 0,030.

2. Tingkat disparitas Kota Pematang Siantar selama periode penelitian menggunakan Indeks Williamson cenderung mengalami kenaikan. Nilai Indeks Williamson di Kota Pematang Siantar tertinggi pada tahun 2014 sebesar 0,031 dan terendah di tahun 2011 dengan nilai 0,275.
 3. PDRB perkapita mempunyai pengaruh negatif terhadap disparitas di Kota Pematang Siantar yang dapat ditinjau dari persentase kenaikan PDRB perkapita Kota Pematang Siantar.
- Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan antara lain, yaitu untuk mengurangi tingkat disparitas antar kota di Kota Pematang Siantar sebaiknya memperhatikan pelaksanaan pembangunan ekonomi agar dapat terlaksana secara menyeluruh dan mengamati setiap pembangunan ekonomi sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dan disparitas dapat lebih diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H.R. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2012. *Sumatera Utara Dalam Angka 2012*.
- Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Sumatera Utara Dalam Angka 2013*. Sumatera Utara: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2014. *Sumatera Utara Dalam Angka 2014*. Sumatera Utara: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Sumatera Utara Dalam Angka 2015*. Sumatera Utara: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Sumatera Utara Dalam Angka 2016*. Sumatera Utara: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Irawan & Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. BPFE. Yogyakarta.
- Jhingan., M. L. 2000 *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Edisi Kesembilan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, M. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Ke-4. UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Baduose Media. Padang.
- Sukirno., S. 2006. *Ekonomi Pembangunan*, Kencana. Jakarta.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Salemba. Jakarta.
- Suryana. 2000. *Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi*, UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Todaro, M. 2010. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*: Balai Aksara. Jakarta.